

SIGNIFIKANSI PERKUMPULAN SUKU BANGSA BAGI PETUGAS POLMAS DI PERKOTAAN

Yulizar Syafri Sofyan

Tulisan ini menguraikan tentang keberadaan dan fungsi perkumpulan sukubangsa (*ethnic group association*) di daerah perkotaan serta keterkaitan bagi Pemolisian masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar pemikiran bagi penerapan Pemolisian masyarakat atau pemolisian komuniti.

Fungsi Perkumpulan Sukubangsa di Perkotaan

Sejarah pertumbuhan kota-kota di wilayah nusantara menunjukkan bahwa kota adalah tempat hunian (tinggal) warga sukubangsa yang memiliki latarbelakang kebudayaan yang berbeda satu sama lainnya. Di perkotaan, masing-masing sukubangsa yang berbeda ini hidup mengelompok dengan sesama sukubangsanya. Faktor pendorong utama migrasi sukubangsa ke daerah perkotaan adalah demi dan untuk meraih keuntungan ekonomi yang (lebih) tersedia di kota-kota pelabuhan tersebut. Kota dengan demikian menjadi sebuah permukiman yang permanen, heterogen secara sukubangsa dan memiliki populasi yang melampaui jumlah anggota Klen (Wirth,1980; Suparlan,2004;Syafri,2007). Klen atau marga adalah suatu kelompok kekerabatan yang berdasarkan azas keturunan melalui garis keturunan pihak laki-laki atau pihak perempuan yang bersumber pada seorang leluhur. Warga sesuatu Klen atau marga belum tentu saling kenal-mengenal satu sama lainnya. Di tempat asal mereka, marga juga tidak terwujud sebagai suatu perkumpulan atau organisasi yang melibatkan warganya.

Gejala seperti ini masih terus berlanjut sampai dengan saat ini, dimana pertumbuhan berbagai kota menyebabkan migrasi sukubangsa ke daerah perkotaan makin sukar atau bahkan tidak mungkin untuk dibendung. Di kota-kota tersebut sebagian besar dari pendatang ini hidup mengelompok dengan sesamanya atau seasal daerah sukubangsanya. Pengelompokan ini kemudian

mendasari terbentuknya kelompok-kelompok sukubangsa. Kalau masyarakat perkotaan itu dilihat sebagai sebuah sistem yang memproses *out put* menjadi *input* maka komuniti-komuniti sukubangsa ini dapat dilihat sebagai komponen-komponennya (yang berhubungan secara fungsional).

Perkumpulan sukubangsa adalah salah satu bentuk nyata dari komuniti-komuniti sukubangsa yang ada di perkotaan. Perkumpulan ini tumbuh terkait dengan strategi adaptasi migran sukubangsa di daerah perkotaan, terkait dengan berbagai kebutuhan yang harus mereka penuhi. Studi yang saya lakukan di kota Batam (2004–2005) dalam rangka penulisan disertasi (saya) menunjukkan signifikansi dari keberadaan perkumpulan sukubangsa ini dalam interaksi warga kota yang berbeda latarbelakang sukubangsanya. Dari sisi perkumpulan sukubangsa ini, Batam adalah merupakan sebuah kota yang heterogen secara sukubangsa. Dalam masyarakat perkotaan yang heterogen ini, perkumpulan yang didirikan oleh masing-masing sukubangsa secara internal merupakan rujukan bagi identitas diri dan secara eksternal merupakan kekuatan sosial dalam berhadapan atau berinteraksi dengan sukubangsa lainnya.

Sukubangsa¹, kesukubangsaan, batas-batas sukubangsa serta berbagai stereotip yang melekat didalamnya merupakan penanda yang tidak dapat begitu saja dibuang dari kehidupan manusia, oleh karena setiap manusia dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungannya dengan menggunakan kebudayaan sukubangsanya (Suparlan, 2004a:70; Syafri, 2007:1). Perkumpulan sukubangsa merupakan wadah di mana batas-batas (sosial) sukubangsa (*ethnic boundary*) diciptakan dan dipertahankan. Di dalam perkumpulan, berbagai simbol-simbol yang mengekspresikan atribut kesukubangsaan tersebut 'diperagakan'. Atribut-atribut tersebut mencakup mulai dari yang bersifat abstrak seperti sistem

1 Sukubangsa didefinisikan sebagai sebuah golongan sosial yang askriftif dan menjadi identitas yang paling mendasar dan umum, serta terbentuk berdasarkan latar belakang tempat kelahiran seseorang maupun latar belakang keluarganya, serta digunakan sebagai acuan identitas sukubangsa atau kesukubangsaan (Barth, 1969:13; Suparlan, 2004a:74). Sebuah identitas pada dasarnya merupakan pengenalan atau pengakuan terhadap seseorang sebagai bagian dari sesuatu golongan yang dilakukan berdasarkan atas serangkaian ciri-cirinya yang merupakan satu satuan yang bulat dan menyeluruh (Suparlan, 2004a:25). Everett Hughes (dalam Jenkins, 1977:10-11) menyatakan bahwa sukubangsa bukan merupakan satu unit sosial yang dapat ditentukan berdasarkan tingkat pengukuran tertentu atau perbedaan-perbedaan yang dapat diamati secara nyata. sebaliknya keberadaan suatu sukubangsa lebih ditentukan karena mereka yang berada dalam lingkaran satu sukubangsa (the ins) dan mereka yang di luar lingkaran sukubangsa tersebut (the outs), berbicara, merasa dan bertindak sebagai dua kelompok yang terpisah satu dengan yang lain. Eksistensi sukubangsa tidak semata-mata sebuah refleksi dari adanya perbedaan kebudayaan, tapi sebagai konsekuensi berkembangnya relasi antara the ins dan the outs.

kekerabatan sampai pada yang nyata terlihat berupa *cultural materials*. Batas-batas sukubangsa yang dipertahankan menyebabkan interaksi antar sukubangsa tersebut cenderung di warnai dengan *streetipe*.

Perkumpulan suku bangsa oleh karena itu dilihat sebagai:

...”organisasi informal atau sukarela yang terbentuk atas dasar latar belakang sukubangsa yang sama dari para anggotanya, maupun kepentingan-kepentingan yang sama di antara anggotanya, dan menggunakan perkumpulan tersebut sebagai alat untuk mencapai tujuan”... (Crissman’s, dalam Schildkrout, 1974;Handelmann, dalam Eriksen, 1993:42-43).

Dalam prakteknya melalui perkumpulan sukubangsa dibedakan siapa yang termasuk anggota sukubangsa dan siapa pula yang bukan merupakan anggota sukubangsa. Dengan melihat sukubangsa sebagai golongan sosial maka potensi sukubangsa dalam pengorganisasian anggotanya terletak pada ciri-cirinya yang *askriptif*. Beranjak dari cirinya yang *askriptif* tersebut masing-masing anggota sukubangsa mengorganisasikan dirinya dalam sebuah bentuk kategori sosial yang dibangun berdasarkan atribut yang *askriptif*, dengan mengacu pada kebudayaannya yang juga *askriptif* (Suparlan,2004;Syafri,2007). Barth, dkk (1969); menunjukkan bahwa akar dari bertahannya kesukubangsaan dan menguatnya batas-batas sukubangsa, terletak pada kompetisi dalam mengakses maupun penguasaan sumberdaya ekonomi serta posisi-posisi strategis. Bruner (1974) telah menunjukkan bahwa di perkotaan, kesukubangsaan dan batas-batas sukubangsa ini bukannya makin meredup, sebaliknya justru makin menguat. Oleh karenanya kehidupan masyarakat di banyak perkotaan cenderung ditandai dengan adanya heterogenitas sukubangsa.

Perkumpulan sukubangsa adalah satu gejala perkotaan karena memang hanya tumbuh dan berkembang di daerah perkotaan, bukan di pedesaan. Pertumbuhannya seperti diuraikan sebelumnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan sosial seperti *kohesi* maupun solidaritas sosial, serta kebutuhan lain anggota sukubangsanya. Seperti saling melindungi satu sama lain, membantu mendapatkan kemudahan untuk mengakses sumberdaya yang ada di kota.

Gmelch dan Zerner (1980:204) menguraikan banyak kajian tentang kesukubangsaan dikaitkan dengan konflik di bidang ekonomi dan politik. Khususnya di perkotaan, kondisi seperti ini tercipta oleh karena sementara

kalangan yang memiliki asal atau latarbelakang sukubangsa yang berbeda bisa memiliki kesempatan (yang sama maupun tidak sama) dalam berkompetisi memperebutkan atau mengakses sumberdaya ekonomi dan politik tersebut. Keadaan ini tentu saja berbeda dengan daerah pedesaan dimana penguasaan sumberdaya strategis tersebut cenderung didapatkan secara *askriptif* melalui jalur kekerabatan seperti klen, serta legitimasi adat dengan melalui hak ulayat misalnya. Keadaan di pedesaan seperti ini 'menutup' peluang bagi terjadinya kompetisi sumberdaya strategis tersebut. Dengan demikian tidak mengherankan kalau di daerah perkotaan relasi antar sukubangsa itu cenderung menjadi makin intensif terkait dengan permasalahan ini.

Dalam kehidupan masyarakat di perkotaan (khususnya Batam), perkumpulan sukubangsa, terwujud sebagai sebuah kelompok kekerabatan yang anggota-anggotanya terikat melalui hubungan seketurunan (*consanguine*) maupun berdasarkan ikatan perkawinan (*affine*). Pengaturan tentang hak dan kewajiban sebagai anggota (sukubangsa) pada umumnya terungkap melalui sistem kekerabatan ini. Sejalan dengan pertumbuhan kota, maka bermunculan pula perkumpulan orang sukubangsa ini. Salah satu penyebabnya adalah di perkotaan ikatan-ikatan seperti keluarga inti, keluarga luas maupun klen tidak dapat mengadopsi berbagai kepentingan warga (suatu) sukubangsa. Dan, memang dalam banyak kehidupan masyarakat di perkotaan

Melalui perkumpulan sukubangsa, sistem kekerabatan dapat menjadi pembingkai aliansi yang berkembang di antara sesama anggota dalam perkumpulan tersebut (Schildkrout, 1974:204; Parkin, 1974:125-5). Ikatan-ikatan kekerabatan ini memang banyak tumbuh di daerah-daerah perkotaan seperti Batam. Sebut saja Ikatan kekeluargaan pada orang Minangkabau (*urang awak*), 'trah' pada orang Jawa', Ikatan semarga pada orang Batak Toba maupun orang Cina dan sukubangsa lainnya. Dalam sistem garis keturunan matrilineal pada orang Minangkabau misalnya keanggotaan kerabat *consanguine* tersebut ditentukan dari pihak ibu atau perempuan. Berdasarkan keanggotaan ini kemudian berkembang satuan-satuan kekerabatan. Meskipun jauh dari tempat asalnya, atau di kota lain hubungan kekerabatan antara mamak dan kemanakannya yang menjadi ciri pertalian kekerabatan pada orang Minangkabau tersebut masih dipertahankan. Dalam hubungan tersebut mamak wajib melindungi kemanakannya, sementara kemanakannya wajib mendengarkan/ mengikuti mamaknya. Hubungan antara mamak dan kemanakan tersebut juga dikembangkan dalam berbagai aktivitas,

misalnya bidang usaha. Namun dalam bidang usaha istilah populernya bukan mamak kemandakan lagi tapi induk semang (*induk samang*). Hubungan induk semang ini mirip dengan hubungan patron-klien sebagaimana dideskripsikan oleh Scott (1977:125) yaitu sebagai suatu bentuk hubungan pertukaran peran antar dua orang yang berbeda statusnya (*dyadic*) dimana yang satu posisinya lebih tinggi (patron atau *induk samang* itu) dan yang satu lagi statusnya lebih rendah (klien). Hubungan patron klien (sesukubangsa) tersebut mencerminkan adanya perbedaan kekuatan di antara keduanya akibat perbedaan posisi sosial dalam sistem garis keturunan yang dimiliki. Hubungan patron-klien sesukubangsa yang dibangun atas dasar pertalian kekerabatan memfasilitasi bagi *urang awak* untuk mendominasi sektor perdagangan menengah bawah. Pertalian kerabat yang ada merupakan dasar bagi terbentuknya kohesi dan solidaritas sosial di antara sesama anggota mendasari terbentuknya kekuatan sosial dalam penguasaan pasar ekonomi tersebut. Terkait dengan ini *stereotype* yang berkembang pada *urang awak* itu adalah 'raja kaki lima'.

Gejala pengungkapan kesukubangsaan seperti ini juga berkembang pada sukubangsa lainnya dimana melalui ikatan yang dilandasi dengan sistem kekerabatan tersebut berbagai hak dan kewajiban di antara anggota kerabat "didistribusikan". Di berbagai perkumpulan sukubangsa (yang ada di Batam), kohesi sosial ini terbangun sebagai akibat dari diaktifkannya atribut-atribut kesukubangsaan dalam interaksi dengan sesama anggota sukubangsa. Misalnya sesama mereka cenderung menggunakan bahasa sukubangsanya dalam berkomunikasi di antara anggota sukubangsa, mendirikan tempat-tempat berkumpul untuk sekedar ngobrol, minum kopi, merancang kegiatan-kegiatan yang menampilkan warna kesukubangsaan maupun keyakinan keagamaannya. Pada orang Minangkabau, *Tabuik* adalah salah satu contohnya maupun 'mudik bersama' atau *pulang basamo*. Berbagai kegiatan yang dilakukan secara bersama kemudian mendorong terbentuknya kohesi dan solidaritas sosial. Kohesi maupun solidaritas di antara sesama anggota dapat terjadi karena melalui perkumpulan ini perbedaan jenjang sosial yang ada diantara anggotanya dalam kehidupan masyarakat luas dapat dilunakkan, karena yang diberlakukan adalah aturan-aturan kekerabatan. Perkumpulan sukubangsa oleh karena itu merupakan sarana pengorganisasian diri yang penting, dimana solidaritas sosial yang terbentuk di antara sesama sukubangsa merupakan landasan bagi penciptaan perkumpulan sukubangsa. Sebagai sebuah kategori sosial maka perkumpulan sukubangsa tersebut dibentuk

dengan mengacu pada atribut yang bersumber dari kebudayaan masing-masing sukubangsa.

Ikatan Keluarga Sumatera Utara adalah contoh lain dimana kekuatan sosial dibangun dengan cara mengaktifkan atribut kesukubangsanya. Asosiasi ini didirikan dengan tujuan menjaga maupun mempererat persatuan untuk saling membantu bagi sesama perantau dalam menghadapi lingkungan sosial ekonomi yang baru di perkotaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syahrir (1990:208) struktur kekerabatan pada orang Batak Toba intinya terletak pada *Dalihan Na Tolu* atau tiga tungku sejerang, yang terdiri atas *hula-bula* (pihak pemberi istri), *boru* sebagai pihak penerima dan *dongan sabutuba* (tetangga atau siapa saja yang kita ajak makan satu piring, atau keluarga jauh). Dan, bila orang Batak Toba pindah ke kota struktur tiga tungku ini ditransformasikan ke dalam bentuk perkumpulan semarga atau perkumpulan orang sesukubangsa. Di kota, kalau patron klen sesukubangsa itu penting bagi *urang awak*, sebaliknya bagi orang Batak Toba, khususnya ikatan *dongan sabutuba ini* (jauh) lebih penting dan berguna dalam mengakses dan bahkan mendominasi penguasaan sumberdaya yang ada. Diperkumpulan ini berkumpul orang Batak Toba dari segala lapisan. Dengan demikian perkumpulan sukubangsa bukan merupakan kelanjutan atau pemindahan cara hidup pedesaan ke daerah perkotaan, melainkan strategi pengorganisasian diri yang dibangun dengan menyeleksi atribut-atribut kesukubangsaaan tertentu sesuai dengan kepentingan pengorganisasian diri tersebut. *Ikatan dongan sabutuba* yang kental pada orang Batak Toba memberi kekuatan sosial bagi mereka untuk mendominasi sektor jasa tertentu (transportasi) dan bidang-bidang birokrasi (tertentu). Anggota Dewan misalnya banyak dimasuki oleh mereka. *Streotipe* yang berkembang, orang Batak Toba penguasa di Dewan Perwakilan Rakyat.

Paguyuban Serumpun Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) adalah contoh lain perkumpulan sukubangsa yang menampung perantau Cina ke Batam. Pendirian PSMTI dinyatakan sebagai wadah untuk memenuhi kerinduan masyarakat kota akan suasana paguyuban (*gemeinshaft*) atau yang bersifat kedesaan, dan bentuknya lebih cair daripada organisasi yang bersifat patembayan (*gesselschaft*). Perkumpulan yang bersifat paguyuban ini sengaja dipilih dengan harapan agar perbedaan karakter masyarakat Cina yang ada di Indonesia dapat dicairkan. Pembentukan perkumpulan ini murni atas inisiatif warga Cina yang ada di tanah air, guna mewadahi berbagai kegiatan

sosial yang mereka miliki, sehingga akan nyata terlihat kontribusinya di masa-masa yang akan datang. Dengan pernyataan ini maka PSMTI penting sebagai rujukan identitas diri perantau Cina setempat. Namun demikian tidak dapat dirampik bahwa di perkumpulan ini beranggotakan banyak pengusaha Cina terkemuka yang mempunyai jaringan bisnis lokal dan mancanegara yang mencerminkan kekuatan ekonomi dari perkumpulan ini. *Streotipe* yang berkembang adalah mereka 'penguasa sektor ekonomi menengah atas'.

Jogoboyo merupakan perkumpulan kesukubangsaan orang Jawa di Batam, khususnya mereka yang dianggap *wong cilik*. Pimpinannya sangat besar perhatiannya kepada kebudayaan Jawa, dan *wong cilik*. *Nguri-uri* kebudayaan *Jowo* atau melestarikan kebudayaan Jawa merupakan keinginannya yang besar, meski sudah lebih lima belas tahun merantau ke Batam. "Darah Jawa" dengan segala atributnya melekat erat dalam dirinya, tampak dalam berbagai koleksi, yang salah satunya adalah gamelan. Deretan *bonang*, *gong* dan berbagai macam gamelan tampak tertata rapi di lantai dua rumahnya. Perawatan terhadap benda-benda itu begitu baik, tampak misalnya warna kuning keemasan gamelan terpancar tajam dari bingkai kayunya yang berwarna coklat. Selain itu deretan koleksinya terdiri dari sejumlah batu-batuan seperti safir, jamrut dan permata. Ada juga keris dan tombak buatan tahun 1420. Secara batin Mas Soeryo merasa telah menyatu dengan ragam koleksinya tersebut. Saat-saat terjebak keras dalam rutinitas pekerjaan, cara yang ideal baginya untuk "melarikan diri" adalah dengan membersihkan "benda keramat" atau deretan koleksinya tersebut. Dijelaskan bahwa masing-masing benda koleksinya tersebut memiliki aura yang memancarkan daya magis yang kental. Dalam kaitannya dengan kesukubangsaan, maka sejumlah koleksi ini menampilkan atribut-atribut kesukubangsaan. *Cultratural material* merupakan penanda yang nyata dari atribut kesukubangsaan tersebut. *Streotipe* yang berkembang adalah para *wong cilik* ini dominan di sektor industri, khususnya para buruh.

Keberadaan masing-masing perkumpulan sukubangsa biasanya tidak sebatas di wilayah kota dimana perkumpulan tersebut didirikan, melainkan meluas jaringannya ke kota-kota lain. Sebagai misal KKSS (Kekerabatan Keluarga Besar Sulawesi Selatan) adalah perkumpulan khusus orang Bugis yang tumbuh di Batam dan memiliki pusat organisasinya di Jakarta. Jaringan KKSS ini dibangun hampir di setiap kota propinsi. Keanggotaan perkumpulan ini tidak hanya sebatas kalangan bawah saja, melainkan meluas sampai pada pemimpin-

pemimpin puncak negeri. Selain itu, sebuah perkumpulan orang sesukubangsa tidak hanya sebatas berfungsi mempererat solidaritas di antara sesama anggotanya, namun juga sebagai mekanisme kontrol yang kuat bagi para anggotanya.

Kasus di kota Batam menunjukkan pengalaman mendirikan KKSS pada mulanya didorong oleh sering terjadinya perkelahian antar sukubangsa di Batam pada masa itu. Penyebabnya adalah karena makin tahun makin banyak saja orang dari berbagai pelosok Tanah Air datang ke Batam. Sampai di Batam mereka saling berebut pekerjaan, sehingga sering terjadi perkelahian. Pertikaian terjadi mulai dari yang kecil sampai yang besar. Melalui perkumpulan sesukubangsa yang ada, upaya-upaya penyelesaian konflik kemudian dilakukan. Seorang pimpinan perkumpulan ini menyatakan, "kalau masing-masing sudah mempunyai perkumpulan sukubangsa maka bila terjadi pertikaian kita tinggal memanggil kepala sukunya (ketua perkumpulan sukubangsa) saja guna mencari jalan damai". Selain itu keberadaan perkumpulan ini juga ditujukan untuk mengamankan anggota suku bangsanya yang suka membuat onar, sampai dengan memulangkannya ke tempat asal (lihat Syafri, 2007). Mereka dikenal sebagai pelaut yang handal dan penguasa ekonomi di sektor pantai.

Mekanisme kontrol ke dalam maupun ke luar lingkup anggota juga tampak misalnya pada *Flobamora* (Flores, Sumba Timor dan Alor). *Bae sonda Bae*, *Flobamora lebe bae* adalah prinsip budaya yang mempersatukan seluruh pendatang *Flobamora* ke Batam. Seorang tokoh Lembata yang sudah (sangat) lama bermukim di Batam mengungkapkan bahwa sejak terbentuknya Provinsi Riau, tahun 1954, yang dipimpin oleh Mr. Amin, yang juga merupakan mertua Gubernur Kepri Ismeth Abdullah, Orang Melayu, Cina dan Flores menjadi pelaku pembangunan yang menonjol di daerah ini. *Streetipe* yang berkembang di masa itu, Orang Melayu adalah suku bangsa yang menjaga peradaban dan adat istiadat. Orang Cina adalah penggerak kehidupan ekonomi, sedangkan orang Flores adalah penggarap pertanian dengan cara membuka hutan. Keharmonisan yang tercipta melalui spesialisasi kerja yang berkembang di antara masing-masing sukubangsa tersebut, mendapat penghargaan yang tinggi dari Mr. Amin, sehingga tahun 1957 orang Flores diberikan tanah di daerah Batu Dua Tanjungpinang untuk mendirikan rumah perkumpulan mereka, atau Persatuan Keluarga Flores (PKF). Selain itu, pekerjaan sebagai *security* adalah pekerjaan "warisan" dari Mr. Amin, dan merupakan penghargaan dari pimpinan daerah untuk menjaga daerah Riau,

atau yang dahulu disebut sebagai Organisasi Pertahanan Semesta (OPS). Sampai saat ini memang orang Flores mendominasi bidang *security*.

KEKAL (Kekerabatan Keluarga Besar Lembata) adalah salah satu perkumpulan sukubangsa yang memberikan perhatian khusus dalam memerangi persoalan *trafficking*¹. Berangkat dari keprihatinan atas kasus yang berasal dari Kupang, perkumpulan sukubangsa ini bertekad menyadarkan warganya akan adanya praktek-praktek *trafficking* yang membahayakan bagi generasi mereka. Persoalan *trafficking* oleh banyak kalangan dinyatakan sangat menonjol di Batam.

Kajian-kajian tentang masyarakat perkotaan menunjukkan bahwa keberadaan perkumpulan sukubangsa adalah sesuatu yang lumrah yang didirikan oleh para migran. Pendirian perkumpulan sukubangsa ini bagi para migran ditujukan untuk melemah bahkan menghilangnya organisasi keluarga terlanda arus besar urbanisasi. Namun yang masih tidak biasa adalah ikut sertanya penduduk (asli) setempat mendirikan perkumpulan sukubangsa ini. Mekanisme kontrol dari perkumpulan sukubangsa ini tampak pada orang Melayu. Seperti dinyatakan Lembaga Adat Melayu (LAM) adalah induk dari semua perkumpulan sukubangsa Melayu yang terdapat di Kepri. Memimpin LAM, yang menjadi penghulu bagi semua organisasi berbasis Melayu di Provinsi Kepri, jelas sangat berat, dan penuh tantangan. Tak hanya dalam mengemban amanat kepercayaan yang diberikan. Tapi juga berusaha untuk mempertahankan agar Melayu tak hilang di bumi (lihat, Syafri, 2007). Ada satu atribut kesukubangsaan yang dimiliki oleh orang Melayu namun tidak dimiliki oleh sukubangsa lainnya, yaitu atribut sebagai penduduk asli atau *Orang Tempatan*. Dalam pembicaraan sehari-hari

1 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2002 memperkirakan sekitar 500.000 warga Indonesia melalui jalur resmi bekerja di luar negeri. Sementara laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia, termasuk Kopbumi, memperkirakan buruh migran yang bekerja di luar negeri mencapai 1,4 juta sampai 2,1 juta, termasuk yang tak terdokumentasi. Laporan lain menunjukkan dari Konferensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) 2001 diperkirakan ada sekitar 1,4 juta pembantu rumah tangga di Indonesia, sebanyak 23 persen adalah anak-anak. Laporan ILO tahun 1998 memperkirakan dari 130.000 - 240.000 pekerja seks di Indonesia 30 persen di antaranya adalah anak-anak di bawah umur 18 tahun. Angka-angka tersebut menunjukkan betapa besarnya potensi perdagangan perempuan dan anak yang menjadi korban trafficking dari Indonesia. Kasus-kasus yang terungkap ke permukaan bukanlah menunjukkan angka sebenarnya, melainkan hanya perkiraan. Sebagaimana dikemukakan oleh Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan Dra. Maswita Daja MSc kasus tersebut seperti fenomena gunung es. Adapun yang terlihat hanyalah sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya. Kita tidak tahu sudah berapa banyak kasus yang lolos dari pengawasan aparat penegak hukum. Atas dasar itulah pemerintah punya komitmen untuk memeranginya, di mana kampanye memerangnya dimulai dari Batam. Lola Wagner dalam harian Batampos, edisi 23 Desember 2006 menuliskan bahwa Dari 210 juta penduduk Indonesia, diperkirakan 40 juta orang berada di bawah garis kemiskinan, mereka adalah korban konflik dan atau bencana alam, tingkat pendidikan mereka rendah dan sempitnya lapangan pekerjaan mengakibatkan angka pengangguran tinggi, kurangnya informasi atau perencanaan masa depan, kurangnya informasi yang jelas tentang kota atau negara tujuan bekerja semuanya dapat menjadi penyebab seseorang menjadi korban trafficking. Batam dan Kepulauan Riau merupakan hotspot di daerah perbatasan Indonesia-Singapura-Malaysia. Kawasan ini mejadi lokasi transit dan tujuan trafficking. Anak dan perempuan dilacurkan dipaksa melacurkan diri, kawin paksa atau terjerat kerja paksa tanpa imbalan gaji dan dikat jeratan hutang.

maupun berita-berita di Media Massa lokal sering dinyatakan *Orang Tempatan* ini dianggap 'terbelakang' dibandingkan sukubangsa pendatang lainnya. Dalam orasi massa di kawasan Tanjung Sengkuang, seorang tokoh politik *Tempatan* menyatakan:

...”Saya ini anak putra daerah, asli Putra Melayu. Maka, pilihlah putra Melayu. Tidak mungkin nasib kita berubah kalau tidak kita sendiri yang mengubahnya”. Saya akan memperjuangkan status Provinsi Kepri agar kedudukannya sama dengan provinsi baru lain. Belum dibentuknya Sekretariat Daerah dan Pejabat Gubernur Kepri menunjukkan sikap pemerintah yang setengah hati memperlakukan Tanah Melayu. Harus diingat, wilayah Kepulauan Riau ini turut memberi sumbangan kepada Republik ini. Sungguh tidak adil jika daerah Kepri yang turut membantu perjalanan hidup bangsa diperlakukan tidak adil. Kita minta Gubemur Riau supaya mendesak peresmian Provinsi Kepri segera terwujud. Sudah lama masyarakat Melayu di Kepri ini dipinggirkan dalam kesempatan memperoleh pekerjaan dan pendidikan. Orang-orang Melayu dianggap bisanya hanya menjadi nelayan dan tidak sekolah. Anggapan itu keliru. Karena itu, saatnya putra Melayu memimpin daerah ini”.

★ Fungsi Pemolisian Masyarakat

Dalam berbagai tulisannya, Prof Parsudi Suparlan membicarakan bahwa fungsi utama dari polisi adalah memelihara keteraturan serta ketertiban sosial dalam masyarakat atau komuniti, terutama masyarakat perkotaan (lihat juga, Djamin, 1999). Secara rinci fungsi dapat digolongkan atas: (a) penegakan hukum dan menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku; (2) Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat; (3) Mengayomi masyarakat, masyarakat dan negara dari ancaman kejahatan yang mengganggu dan merugikan.

Dalam memelihara keteraturan dan ketertiban komuniti, petugas-petugas polisi atau sejumlah petugas polisi dituntut untuk dekat dan berinteraksi dengan komuniti dan masyarakat yang dilayaninya. Terkait dengan fungsi polisi ini kemudian sejak 13 Oktober 2005 Pemolisian Masyarakat atau Polmas dijadikan strategi baru Pemolisian Indonesia. Polmas didefinisikan sebagai sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi dalam memecahkan masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan. Lebih

lanjut dinyatakan bahwa polisi dan Masyarakat bekerjasama untuk memberantas, menekan, mencegah kejahatan dan ketidaktertiban dalam masyarakat. Chryshnanda DL (2004, 95) menjelaskan pemolisian komuniti atau Pemolisian masyarakat adalah gaya pemolisian sebagai suatu tindakan atau aktivitas kepolisian dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan pencegahan terjadinya tindak kejahatan dan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban. Dengan demikian terjadi pergeseran paradigma Pemolisian, dimana sebelumnya masyarakat dijadikan objek dalam menyelenggarakan fungsi kepolisian, maka dengan Polmas masyarakat atau komuniti dijadikan subyek. Dua kata kunci yang menandai pergeseran paradigma ini adalah kemitraan dan pemecahan masalah (Pemolisian Masyarakat, 2006: 4-8, 22).

Meliala (2006:67-68) mengemukakan bahwa elaborasi lebih lanjut dari aspek kemitraan dan kesetaraan antara polisi dan masyarakat terletak pada (penguatan) kemampuan berdialog. Artinya polisi harus banyak melakukan konsultasi dalam hal apa, dengan kadar toleransi bagaimana serta dengan apa masyarakat hendak diamankan?

Kasus tentang perkumpulan sukubangsa yang diuraikan secara panjang lebar di atas menunjukkan bahwa keberagaman dalam kehidupan masyarakat perkotaan (memang) membawa tantangan tersendiri bagi penerapan Polmas. Mengapa demikian? Karena di satu sisi kesukubangsaan yang menandai keberagaman ini berpotensi mendatangkan ancaman yang mengarah kepada disintegrasi sosial. Sejak kota (seperti Batam) dikembangkan sebagai motor penggerak ekonomi nasional sudah terjadi dua kali konflik kekerasan di antara warga kota yang berbeda latarbelakang kebudayaannya. Konflik ini bukan dipicu karena masing-masing sukubangsa memiliki kebudayaan yang berbeda namun sebagaimana yang terurai di atas, konflik ini jelas-jelas berakar dari perebutan sumberdaya ekonomi. Pergesekan/konflik fisik antara orang Batak dan Minangkabau masih segar dalam ingatan warga setempat, meskipun sudah berlangsung cukup lama. Penyebabnya adalah masalah judi dan percaloan antar preman di Pelabuhan Sekupang, pada suatu hari Minggu di tahun 2001. Konflik fisik yang terjadi berlanjut dengan pembakaran tiga unit bengkel dan tempat tambal ban di kawasan Jodoh beberapa hari berikutnya. Selain itu satu unit mobil dirusak dan dibakar oleh kelompok massa tak dikenal. Bahkan seorang sopir taksi, Hendry (30), penduduk Batuaji, dibacok hingga tewas. Temannya,

Darjono (28), mengalami luka bacok di bagian kepala sehingga terpaksa dirawat di RS Harapan Bunda. Pengelompokan massa orang Minangkabau terlihat mencolok di kawasan Sungai Harapan, Jodoh, dan Batuaji. Bahkan, di sebuah SPBU kawasan Sei Panas, salah seorang warga Batak Toba dikeroyok massa orang Minangkabau hingga babak belur karena sepeda motornya bersenggolan dengan penjojek¹. Konflik fisik yang cukup memakan korban juga pernah terjadi antara Orang Batak dengan Orang Flores. Seorang tokoh IKABSU mengemukakan:

...”yang sering membuat onar di Batam ini adalah para BTL (Batak Tembak Langsung). Artinya mereka pendatang Batak (Toba) yang langsung bermigrasi dari kampung halamannya ke Batam. Jadi bukan semua orang Batak di sini suka membuat keributan”...

Dalam konteks perebutan sumberdaya ekonomi mencuat misalnya isu marginalisasi masyarakat *hinterland*. Seorang Profesor yang menjadi tokoh masyarakat *hinterland* mengemukakan; “... *selama ini masyarakat di hinterland nyaris hanya dipandang sebelah mata pembangunannya sehingga terus jauh tertinggal dibandingkan kondisi di wilayah perkotaan....*”. Selain sumberdaya ekonomi maka perebutan sumberdaya politik juga mewarnai relasi antar sukubangsa melalui perkumpulan-perkumpulan sukubangsa yang didirikan. Dalam persaingan ini yang terjadi tidak hanya persaingan di antara masing-masing sukubangsa, melainkan kolaborasi di antara sekelompok perkumpulan sukubangsa melawan kolaborasi sekelompok sukubangsa lainnya (lihat Syafri, 2007). Ruang penulisan yang terbatas ini tidak memungkinkan bagi saya untuk mengelaborasi lebih lanjut tentang persaingan penguasaan sumberdaya politik maupun konflik kelembagaan dimana kekuatan sosial kesukubangsaan juga turut diaktifkan. Dan, pemaknaan penduduk asli yang berpengaruh pada konstruksi interaksi antar sukubangsa dalam mengakses sumberdaya politik setempat.

1 Dalam wawancara dengan Raja Zainuddin, seorang tokoh Melayu di Batam terungkap bahwa konflik simbolik antara orang Batak Toba dengan penduduk setempat juga pernah terjadi. Konflik tersebut muncul akibat pernyataan Ampunan Situmeang, seorang pejabat PPAT yang terkenal di Batam bahwa tidak ada penduduk asli di Batam. Batam sebelumnya adalah daerah kosong yang dihuni oleh kera. Pernyataan Ampunan Situmeang tersebut membuat orang Melayu setempat merasa tersinggung. Mereka menuntut Situmeang membuat pernyataan maaf selama beberapa hari di media massa atau keluar dari Batam. Samson Rambah Pasir, ketua Dewan Kesenian Batam menyatakan: “Saya sangat menyesalkan kalau ada orang yang masih menyebutkan Batam sebagai daerah yang tidak berpenghuni, selain tidak diketahui tahu berapa lahirnya Batam sebagai sebuah kota karena tidak ada bukti sejarah yang mendukungnya. Padahal kalau dilihat dari perjalanan sejarah sudah dapat dipastikan awal berdirinya Batam pada saat Sultan Lingga membuat surat hibah kepada Raja Ali Kelana. Sejarah awal berdirinya adalah pada tahun 1898. Fakta sejarah tersebut dapat dibenarkan dengan adanya surat hibah Sultan Lingga kepada Raja Ali Kelana yang memang menyebutkan hal tersebut”...

Tantangan terbesar dalam Polmas dalam konteks masyarakat perkotaan (seperti Batam) adalah pemahaman tentang karakter, keberadaan maupun fungsi-fungsi perkumpulan sukubangsa yang ada setempat. Dan, unit-unit sosial yang melandasi pendirian perkumpulan tersebut. Tanpa pemahaman yang baik dan mendalam tentang hal ini tentunya agak sukar bagi polisi membina hubungan atau berdialog dalam rangka membina kesetaraan dengan kelompok-kelompok sukubangsa setempat. Oleh karena itu sebagaimana yang seringkali ditekankan oleh Prof. Parsudi Suparlan (2004,139), petugas polisi yang ditunjuk untuk tugas pemolisian komuniti atau Pemolisian masyarakat mencakup Polsek dan Polres haruslah yang dapat berbahasa dan memahami kebudayaan sukubangsa dari komuniti atau masyarakat (perkotaan) setempat. Tersirat dibalik pesan ini adalah petugas pemolisian komuniti harus punya *sense of ethnographic* (kepekaan etnografis) yang memiliki ketajaman pemahaman terhadap sukubangsa dan kebudayaannya dan pengembangan serta wadahnya dalam konteks-konteks masyarakat perkotaan. Dan, melalui pesan ini tidak pula dimaksudkan agar petugas pemolisian komuniti itu harus menjadi atau dijadikan sebagai seorang antropolog, namun yang perlu ditekankan adalah kepekaan tersebut.

Sebagai contoh, kita membaca secara statistik terdapat perbedaan komposisi sukubangsa di Riau. Kira-kira 50% penduduknya adalah berasal dari Minangkabau, 30 persen berasal dari berbagai sukubangsa: Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Makasar, Buton, Cina, Flores dan berbagai sukubangsa lainnya (lihat Suparlan, 2004:138). Dengan menggunakan hipotesis kebudayaan dominan Bruner (1974) misalnya, atau *perspektif Foucault* yang melihat kandungan atau muatan kekuatan sosial (dalam interaksi antar sukubangsa), secara teoritis sudah dapat diprediksi potensi konflik antar sukubangsa yang kemungkinan akan terjadi. Oleh karena itu petugas Pemolisian masyarakat sudah dapat merancang antisipasinya, baik dalam bentuk penanganan langsung manakala konflik terjadi, atau yang lebih baik dari awal bisa mencegah agar konflik yang di duga atau dianalisis akan terjadi, justru tidak terjadi. Misalnya *Split labor market*, atau penguasaan bidang ekonomi berdasarkan sukubangsa tertentu bisa berpotensi menimbulkan konflik (antar sukubangsa).

Uraian panjang lebar ini menunjukkan bahwa struktur sosial masyarakat perkotaan yang heterogen memiliki potensi harmoni maupun disharmoni atau konflik sosial yang sama besarnya. Signifikansi dari perkumpulan sukubangsa dalam polmas antara lain *pertama*, perkumpulan tersebut dapat dijadikan wadah

sosialisasi bagi keberadaan dan fungsi polmas di tingkat masyarakat. Kedua, Perkumpulan sukubangsa seperti terurai di atas dapat dijadikan dasar bagi membangun kemitraan dengan masyarakat, atau merupakan (wadah) untuk memotivasi warga komuniti dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan, minimal bagi anggota sukubangsanya. Mencegah kejahatan dalam hal ini diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan polisi dan masyarakat guna mengurangi kejahatan. Kasus ini menunjukkan bahwa perkumpulan sukubangsa adalah sebuah kekuatan sosial dalam struktur interaksi yang terjadi di lingkungan (sosial, politik maupun ekonomi) perkotaan. Kekuatan sosial perkumpulan sesukubangsa ini terutama terealisasi dalam pendominasian sektor-sektor ekonomi tertentu. Perebutan maupun pendominasian sektor ekonomi atau usaha tersebut tidak menutup terjadinya tindak kejahatan.

Kesimpulan

Di tingkat konseptual sebenarnya terjadi perdebatan antara Pemolisian masyarakat dan pemolisian komuniti (Suparlan, 2004;2006; Meliala, 2006). Makalah ini tidak dimaksudkan membahas perdebatan tersebut. Untuk sementara dalam makalah ini disamakan makna antara pemolisian komuniti dan Pemolisian komunitas. Tulisan ini menguraikan tentang Pemolisian masyarakat atau pemolisian komuniti sebagai sebuah gaya atau strategi dalam pelaksanaan tugas polisi memelihara keteraturan dan keteriban masyarakat. Pemolisian masyarakat mendorong polisi untuk selalu dekat dengan masyarakat dan berada dalam proses interaksi dengan masyarakat dan komuniti yang dilayaninya. Interaksi ini muncul dalam berbagai dialog yang di satu sisi menuntut kepekaan polisi akan heterogenitas yang menjadi karakter kehidupan, khususnya masyarakat perkotaan. Dalam masyarakat perkotaan yang heterogen secara sukubangsa, tumbuh berbagai bentuk perkumpulan yang mengekspresikan heterogenitas struktur perkotaan.

Heterogenitas masyarakat perkotaan tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi pengimplementasian gaya Pemolisian masyarakat tersebut. Tantangan ini dapat dijawab salah satunya dengan 'menumbuhkan *sense of ethnographer*' bagi petugas pemolisian masyarakat. Kepekaan ini di asah dengan mengakses kajian-kajian etnografi yang telah dilakukan dan 'membaca' kehidupan masyarakat setempat dengan perspektif etnografis. Kepekaan ini lebih lanjut dapat menjadi nilai tambah guna mengasah kemampuan dialog para petugas.

Dialog bisa dijadikan 'senjata baru' untuk menghindari kesalahpahaman yang muncul dan yang sering menjadi hambatan utama dalam program kemitraan masyarakat.

Bahan Bacaan

Barth, F

1969 *Ethnic Groups and Boundaries*. Boston: Little, Brown & Co. hal 9-38.

Louis Wirth

1980 "Urbanism As A Way of Life", dalam: *Urban Life. Reading in Urban Anthropology*. Eds. By George Gmelch and Walter P. Zanner. New York. St Martin's Press.

Bruner, Edward M

1974 "Expression of Ethnicity in Indonesia", dalam : *Urban Ethnicity*. Diedit oleh Abner Cohen. London. Tavistock. Hal. 251-280.

Dwilaksana, Chryshnanda

2006 "Pemolisian Komuniti (*Community Policing*) Dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban", dalam: *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Ed. Parsudi Suparlan. Jakarta: YPKIK

Foucault, Michel

1978 *History of Sexuality*, vol. 1, trans. Micahel Hurley. New York: Pantheon.

Jenkins, R

1998 *Rethinking Ethnicity. Arguments and Explorations*. London Tavistock.

Meliala, Adrianus

2006 "Beberapa Masalah Substansial Terkait Polmas", dalam: *Jurnal Polisi Indonesia*. Edisi VIII / Mei.

Schildkrout, E

1974 "Ethnicity and generational difference among urban Immigrants in Ghana, dalam: Abner Cohen (ed) *Urban Ethnicity*. London. Tavistock Publication

Suparlan, Parsudi

2004 "Polisi Masa Depan", dalam: Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia. Ed. Parsudi Suparlan. Jakarta: YPKIK

2004^b Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

2006 "Polisi Sipil dan Pemolisian Komuniti Dalam Masyarakat Majemuk Indonesia". Jurnal Polisi Indonesia. Edisi VIII / Mei.

Syafri, Yulizar

2007 "Perkumpulan Sukubangsa Minangkabau dan Politik di Batam". *Disertasi*. Program Pasca Sarjana Antropologi. Universitas Indonesia. Tidak diterbitkan.

Syahrir, Kartini

1990 Pasar Tenaga Kerja Indonesia. Kasus Sektor Konstruksi. Jakarta: Grafiti Press.

